

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI

Oleh: Ida Bagus Rai *)

ABSTRAK

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan sarana utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di kampus.

Pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan di perguruan tinggi. Ini tidak saja penting sebagai langkah kuratif terhadap gejala demoralisasi dan patologi sosial di masyarakat, tetapi juga sebagai langkah preventif dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya atau pembentukan warga negara Indonesia yang baik yang mencerminkan karakter kehidupan berbangsa. Untuk kepentingan ini Pendidikan Karakter di perguruan tinggi perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya. Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat diimplementasikan sebagai berikut 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yakni dengan mengintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui berbagai mata kuliah baik secara parsial maupun terpadu dalam kelompok tertentu, 2) Pelaksanaan kegiatan pembiasaan keseharian yang berada di kampus, melalui pengembangan budaya/kultur kampus untuk pengembangan pendidikan karakter, 3) Pelaksanaan ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pendidikan kepramukaan, olah raga, seni, keagamaan, dan lain-lain, 4) Kegiatan pembiasaan keseharian di kampus dan rumah dilakukan dengan memberdayakan dukungan orangtua dan masyarakat.

I. Pendahuluan

Pendidikan karakter bangsa adalah upaya yang dilakukan oleh Negara (Pemerintah), masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter luhur. Karakter baik adalah perilaku hidup dengan benar yang sesuai falsafah hidup bangsa Indonesia (Pancasila). Karakter luhur tersebut yakni perilaku manusia Indonesia dalam hubungan manusia dengan: Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, alam lingkungan hidupnya, bangsa dan negaranya, serta dengan diri sendiri.

Karakter bangsa yang dibangun dalam pendidikan juga mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan komitmen yang konsisten dari kita semua, mulai dari kebijakan Nasional sampai pada implementasi ditingkat pendidikan dan sosialisai pengembangan di masyarakat. Tekanan yang kuat akibat adanya harus globalisasi mengharuskan kita untuk merepleksi diri membangun jati diri bangsa. Arus globalisasi yang sangat deras dalam berbagai aspek membawa perkembangan dunia terus melaju ke arah peradaban multi budaya. Kondisi tersebut menuntut kemampuan bangsa Indonesia untuk beradaptasi secara selektif dengan multikulturalisme tanpa harus kehilangan identitas dan jati diri bangsa yang berideologi Pancasila. Oleh karena itu, pembinaan karakter bangsa harus berlandaskan pada:

1. Ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
2. Agama-agama, sistem kepercayaan, dan Budaya luhur yang berkembang di masyarakat Indonesia;
3. Nilai Moral yang dijunjung tinggi masyarakat;
4. Sistem norma—hukum yang berlaku di Indonesia.

Memang, tidaklah mudah untuk mewujudkan hal tersebut menjadi pola berpikir, nilai-nilai dan sikap, komitmen, kehendak, serta pola tindakan bersama semua komponen bangsa. Tetapi, menjadi tugas semua anak bangsa jugalah tentunya bagaimana memegang teguh komitmen bersama membangun sistem pendidikan bagi generasi muda yang mampu menumbuh kembangkan karakter dan sekaligus membangun peradaban Bangsa Indonesia.

Konsep pendidikan karakter ini telah diterjemahkan oleh Universitas Dwijendra dalam visi berguna, berbudaya, mandiri dan sejahtera (Naya Mantera). Penerjemahan visi lembaga tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tataran aplikasinya dengan mengintegrasikan muatan visi yang bernuansa pendidikan karakter tersebut dalam proses belajar mengajar. Dalam implementasinya, terintegrasi dalam penyusunan silabi dan RPS, muatan karakter dimasukkan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran adalah strategi Active learning (belajar aktif) yang pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dengan memberikan *strategi active learning* (belajar aktif) pada anak didik dapat membantu ingatan mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Hal ini kurang diperhatikan pada pembelajaran konvensional yang berlangsung selama ini. Dalam metode *active learning*, setiap materi pelajaran baru yang diberikan dosen, harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar mahasiswa dapat belajar secara aktif dosen perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.

Lembaga Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa berbasis Pancasila dalam rangka memajukan peradaban bangsa. Sesuai dengan visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) IV (2003-2010), maka pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dasar untuk mencapai visi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa daya saing bangsa hanya dapat dicapai dalam bingkai karakter bangsa dan peradaban yang kuat. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan dan titik kulminasi proses pendidikan dalam jenjang pendidikan formal jelas memiliki peran dan tanggung jawab dalam memantapkan pembinaan karakter bangsa yang telah dibangun dan dikembangkan sejak pendidikan dasar. Untuk itu pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sarjana

yang memiliki pengetahuan yang kuat, memahami bagaimana menjadi warganegara yang baik dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Brodjonegoro, 2003).

Karena karakter sebagai faktor kepribadian tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya, maka manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila juga sesungguhnya tidaklah dapat dilepaskan dari karakter budaya nasional Indonesia. Karakter budaya nasional Indonesia dimaksud adalah yang bertumpu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010:9-11).

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa budaya nasional juga berbasis pada kearifan budaya lokal yang hidup dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang multikultur dalam bentuk modal sosial yang tumbuh dan berkembang menjadi pelangi kekayaan kebudayaan nasional. Kearifan lokal orang Bali, misalnya, telah memiliki modal sosial yang sejalan dengan nilai-nilai nasional adalah dalam bentuk kearifan *Tri Hita Karana*. Dengan kearifan dan nilai-nilai *Tri Hita Karana* inilah orang Bali yang mengaku dan menjadi satu sebagai bangsa Indonesia juga berperan nyata dalam berkontribusi pengembangan kekayaan kebudayaan nasional dan pengembangan karakter bangsa Indonesia. Konsep *Tri Hita Karana* adalah membangun kesejahteraan hidup melalui pembangunan yang seimbang antara kehidupan religius (Manusia dengan sang Pencipta), kehidupan antar manusia dan manusia serta antara manusia dengan lingkungan

Pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional dengan interaksi budaya lokal dan global seperti di atas telah memberikan kesadaran kepada pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat monopluralistik dengan sebuah adagium yang dapat digambarkan dalam karakter kehidupan yang memiliki kemampuan *think globally, act locally, and commit nationally* (Sukadi, 2006). Ketiga karakter kemampuan atau kompetensi ini bukanlah sesuatu yang harus

dipertentangkan satu sama lain, melainkan harus diintegrasikan dan disenergikan sehingga menjadi satu kekuatan modal sosial budaya nasional yang dinamis.

Integrasi dan sinergi ketiga kemampuan dan kepribadian tersebut telah mampu membentuk dan menjadi karakter yang memberikan identitas nasional kepada manusia Indonesia yang bisa dijabarkan dalam penghargaan nilai-nilai. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian nasional tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan dan toleransi, dan menghargai keberagaman. Karakter manusia dan masyarakat Indonesia juga menonjolkan: persaudaraan umat manusia, cinta damai, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai kecerdasan, kreativitas dan inovasi, motivasi berprestasi, etos kerja, mandiri dan kewirausahaan, disiplin, kompetisi secara fair, dan bekerjasama untuk perdamaian. Sebagai satu komunitas bangsa, masyarakat Indonesia juga mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa gotong royong, menunjukkan semangat patriotisme dan kepahlawanan, menjunjung tinggi nasionalisme dan mengabdikan diri untuk *dharma negara*, beretika untuk menghargai lingkungan, dan mengembangkan budaya malu. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain adalah: etika dialog, komunikatif, jujur, terbuka, demokratis, setia dan patuh kepada pemimpin, serta menghargai dan mematuhi norma-norma dan hukum. Tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja, mengakui dan menghormati keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan orientasi masa lalu masa kini dan masa depan (bandingkan dengan Pemerintah Republik Indonesia; 2010:20-22).

Sayangnya, kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia oleh banyak pihak diakui telah menunjukkan adanya degradasi atau demoralisasi dalam pembentukan karakter

dan kepribadian Pancasila tersebut. Degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai inti atau *core values* dari pembentukan karakter bangsa berdasar Pancasila tersebut tidak saja terjadi di kalangan masyarakat awam di tingkat akar rumput, tetapi juga sudah merambah ke kepribadian para profesional, tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para pemimpin bangsa dan negara. Tidak mengherankan, karena itu, jika banyak penilaian masyarakat internasional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia dan birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah birokrasi pemerintahan paling buruk kedua di dunia (Baca Balipost). Dua penilaian ini saja sudah mencerminkan bagaimana kesatuan nilai-nilai Pancasila telah terabaikan dan termarginalkan dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia (2010:16-19), dewasa ini ada enam permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul pula berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini muncul dalam berbagai kasus, seperti: kasus narkoba yang makin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa yang makin menghiasi berita TV, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pornografi dan porno aksi yang makin vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik, hubungan seks bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda siswa dan mahasiswa, tindakan KKN di mana-mana, serta kasus mafia hukum dan peradilan. Tidak kalah hebohnya adalah munculnya

gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat Indonesia sendiri, kasus *money politics* dalam pilkada dan pemilu legislatif, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang makin tajam dan tidak fair, pameran kekayaan yang makin tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin, kasus penggusuran kelompok miskin di kota-kota besar, dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat. Kasus-kasus tersebut adalah sedikit contoh kecil dari gunung es bagaimana degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dewasa ini.

Proses degradasi nilai dan moral tersebut bukanlah proses yang singkat hingga memunculkan karakter manusia Indonesia yang cenderung memiliki nilai-nilai positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika pembudayaan nilai-nilai menyimpang tersebut pada dasarnya juga adalah hasil proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan generasi masyarakat yang kurang berkarakter Pancasila. Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominasi atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka. Rektor IAIN Jakarta pernah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang membangun sifat-sifat: berterima kasih dan memaafkan (*orphan*), menjadi diri sendiri (*wanderer*), memiliki mental juara (*warrior*), membantu orang lain dengan ikhlas (*altruist*), bahagia dan damai (*innocent*), dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin (*magician*). Menurut Mahatma Gandhi pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: "*to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*"

(Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat) (Williams dan Megawangi, 2010). Jelaslah bahwa pendidikan karakter bangsa itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.

Karakter, sebagaimana didefinisikan oleh Simon Philips (2008), adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A (2007) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan". Sementara itu, Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanasifasikan karakter buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanasifasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan 'personality'. Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Akhirnya, Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Dari empat definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya.

Tetapi, karakter bukanlah masalah kepribadian individualitas saja. Dalam pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominasi bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun

yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai "kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa". Sejalan dengan pengertian ini, karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 7). Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektif-sistemik masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Semua upaya ini adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar Pancasila.

Bagaimana karakter seperti di atas dimantapkan melalui proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi? Inilah yang menjadi fokus utama kajian dalam pengembangan Panduan Pendidikan Karakter untuk Perguruan Tinggi ini. Sebelum jauh kita menganalisis bagaimana implementasi pendidikan karakter bangsa, perlu kiranya dipahami dan diyakini terlebih dahulu bagaimana kita membangun ideologi yang tepat untuk mempedomani pengembangan hakikat pendidikan karakter bangsa dalam rangka membangun Karakter Bangsa Indonesia.

II. Hakikat Pendidikan Karakter

Di atas telah disebutkan bahwa pendidikan karakter sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari program pendidikan pada umumnya. Karena itu, untuk memahami makna pendidikan karakter tidaklah bisa dilepaskan dari makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan, di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jelas sekali dari rumusan pengertian pendidikan tersebut bahwa proses pendidikan tidak bisa lepas dari tujuan-tujuan pembentukan karakter peserta didik sebagaimana tersurat dari konsep-konsep: memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Dengan rumusan pengertian pendidikan seperti tersurat di atas bahkan dapat dikatakan bahwa yang utama dan dominan dalam proses pendidikan itu sendiri sesungguhnya adalah proses pendidikan karakter di samping terjadi pula proses pendidikan untuk peningkatan kecerdasan intelektual dan pendidikan untuk keterampilan hidup yang diperlukan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

Tersurat pula bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan dasar pendidikan tersebut, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lagi-lagi dari rumusan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional seperti tergambar di atas, tampak nyata bahwa pendidikan nasional itu yang utama dan dominan adalah program pendidikan karakter. Dari dasar pendidikan nasional tampak jelas bahwa yang melandasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila, termasuk yang tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dari sini dapat dipahami bahwa landasan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pembentukan karakter kehidupan berbangsa. Demikian pula dengan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman jelas menunjukkan bahwa jiwa atau roh pendidikan nasional itu sesungguhnya pembentukan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kebudayaan nasional, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam pertumbuhan dan perkembangan jaman. Jadi, tidaklah ada dasar pendidikan yang lekang dari nilai-nilai yang akan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia dan warga negara Indonesia seutuhnya. Karena itu, fungsi dan tujuan pendidikan juga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik yang dapat digambarkan dengan manifestasi nilai-nilai seperti: membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengapa pendidikan karakter menjadi yang dominan atau utama dalam pelaksanaan program pendidikan? Karena, pendidikan karakter itu sendiri adalah roh, semangat, energi, atau spirit yang menjiwai dan akan menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan pendidikan. Di sini, pendidikan tanpa roh, spirit, atau jiwa tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Doni Koesoema A.(2010:115) roh pendidikan

karakter dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi pendidikan karakter dapat memacu dan meningkatkan kemampuan intelektual dan akademis, di sisi lain pendidikan karakter dapat menjadi usaha pemertahanan dan pengembangan kapasitas moral peserta didik. Kedua kekuatan ini dapat menjadi idealisme pendidikan agar dapat mengarahkan peserta didik semakin mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat.

Pendidikan karakter bukanlah proses pengajaran yang bersifat transfer informasi semata. Pendidikan karakter juga bukanlah proses penanaman nilai-nilai belaka. Begitu pula pendidikan karakter bukanlah hanya melatih peserta didik untuk memiliki keterampilan-keterampilan teknis dan kejuruan semata. Lebih dari itu semua, pendidikan karakter adalah proses memfasilitasi, membimbing, mendorong, memberi semangat, menemani, mengarahkan, menguatkan, dan menyontohkan atau meneladankan kepada peserta didik bagaimana seluruh potensinya dapat diaktualisasikan secara optimal menjadi berbagai bentuk kapabilitas yang akan membentuk karakter atau kepribadian peserta didik. Potensi-potensi yang dapat diberdayakan itu pun sifatnya holistik dan multidimensional. Potensi-potensi itu bisa dilihat dari keutuhan aspek-aspek: pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, keterampilan, konfidensi, komitmen, maupun kompetensinya. Bisa juga potensi itu diwujudkan dalam dimensi kecakapan-kecakapan hidup secara: personal, sosial, intelektual, akademis, dan vokasional.

Pendidikan karakter juga dapat dipahami sebagai proses humanisasi dalam rangka memanusiakan manusia menjadi manusiawi. Di sini proses pendidikan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek dengan menjadikannya sebagai robot bagi kehendak orang dewasa. Pendidikan karakter sebagai proses manusiawi, sebaliknya, menjadikan peserta didik sebagai subjek yang bebas, mandiri, dan kritis. Pendidikan karakter haruslah mampu menyadarkan peserta didik tentang eksistensi dirinya dan

tentang realitas sosialnya, dan untuk selanjutnya, dengan kesadarannya, peserta didik bersama-sama pendidik melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk ini perlu ada proses penyadaran psikologis, sosial, moral, dan spiritual, pemberdayaan, pembinaan, pengembangan, dan perluasan seperangkat sistem nilai dan norma ke dalam tatanan nilai dan keyakinan (*value and belief system*) peserta didik secara layak dan manusiawi.

Proses manusiawi juga bermakna bahwa program pendidikan haruslah mampu menghargai keutuhan eksistensi dan jati diri manusia. Dalam pandangan Pancasila, manusia itu adalah makhluk monopluralistik. Dalam susunan kodratnya manusia itu tersusun dari aspek jasmaniah/raga (materi) dan unsur jiwa (rohaniah) dengan segala sifatnya yang saling berkaitan. Dari kedudukan kodratnya, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk biologis, makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berpikir yang berbudi sekaligus. Kelima kedudukan dengan sifat-sifatnya yang unik ini pun tidak dapat dipisah-pisahkan, melainkan saling mengkait satu sama lain. Akhirnya, dari perkembangan kodratnya manusia itu adalah makhluk yang dilahirkan, tumbuh dan berkembang, dan akhirnya mengalami kemusnahan baik secara fisik maupun mental. Konsekuensi dari pandangan seperti ini adalah pendidikan mestinya tidaklah mereduksi manusia sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang bebas, mandiri, dan integral. Manusia bukanlah hanya makhluk pemikir yang hanya perlu dikembangkan kecerdasan intelektualnya saja. Pendidikan karakter sebagai proses manusiawi, haruslah menghargai subjek didik secara utuh sehingga perlu diberdayakan fisik dan mental atau rohaniahnya, perlu disinergikan hakikatnya sebagai makhluk biologis, religius, individu, sosial, dan makhluk berpikir yang berbudi secara serasi selaras dan seimbang, dan perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip lahir, tumbuh dan berkembang, serta kealpaannya secara fisik dan mental. Proses pendidikan, karena itu, bukanlah proses pembinaan psikologis

semata. Pendidikan karakter haruslah mampu mensinergikan perkembangan proses fisik biologis, proses psikologis, proses sosial, proses budaya, proses estetis, proses moral, dan proses spiritual sekaligus. Untuk ini pendidikan karakter menciptakan sebuah lingkungan hidup dan lingkungan sosial budaya yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan dan kepribadian sebagai cermin keseimbangan intelektual, moral, dan spiritual (Doni Koesoema A., 2010: 116). Jika ini dapat diberdayakan, maka terbentuklah karakter yang kuat yang mencerminkan keutuhan sifat-sifat manusiawi tersebut. Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, kampus, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: **Olah Hati** (*Spiritual and emotional development*), **Olah Pikir** (*intellectual development*), **Olah Raga dan Kinestetik** (*Physical and kinesthetic development*), dan **Olah Rasa dan Karsa** (*Affective and Creativity development*) yang secara diagramatik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karena itu muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi *moral reasoning*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* (Lickona:1991), atau dalam arti utuh sebagai *morality* yang mencakup *moral judgment and moral behaviour* baik yang bersifat *prohibition-oriented morality* maupun *pro-social morality* (Piaget, 1967; Kohlberg; 1976)

Pendidikan karakter yang secara sistematis diterapkan dalam pendidikan merupakan sebuah daya tawar berharga bagi seluruh komunitas. Peserta didik mendapatkan keuntungan dengan memperoleh perilaku dan kebiasaan positif yang mampu meningkatkan rasa percaya dalam diri mereka, membuat hidup mereka lebih bahagia dan lebih produktif. Tugas-tugas pendidik menjadi lebih ringan dan lebih memberikan kepuasan ketika peserta didik memiliki disiplin yang lebih besar di dalam kelas. Para orangtua juga bergembira ketika anak-anak mereka belajar untuk menjadi lebih sopan, memiliki rasa hormat, dan lebih produktif. Para pengelola lembaga pendidikan akan menyaksikan berbagai macam perbaikan dalam hal disiplin, kehadiran, beasiswa, pengenalan nilai-nilai moral bagi peserta didik maupun guru, demikian juga berkurangnya tindakan vandalisme di kampus dan di masyarakat.”

Pendidikan karakter dengan gambaran seperti di atas tidaklah bisa hanya menjadi monopoli tanggung jawab lembaga pendidikan kampus atau perguruan tinggi saja. Pendidikan karakter sebagai proses pemberdayaan, proses humanisasi, dan proses civilisasi haruslah menjadi tanggung jawab bersama kampus, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tidaklah mungkin seorang guru mengajarkan nilai-nilai kejujuran di kampus, jika kebijakan UAN dari pemerintah, misalnya, telah membuat guru-guru terpaksa harus membantu siswanya menyelesaikan soal-soal ujian. Tidaklah mungkin juga kampus mengajarkan nilai-nilai kerja sama dan gotong royong, jika dalam masyarakat banyak terjadi konflik sosial bersenjata. Tetapi, ini juga tidak berarti bahwa kampus atau perguruan tinggi bisa menghindari tanggung jawab pendidikan karakter hanya karena dalam masyarakat telah terjadi gejala demoralisasi atau patologi sosial. Ini karena sesungguhnya kita pun bisa berharap bahwa pendidikan karakter yang dengan baik dilakukan dapat menjadi wahana yang ampuh sebagai strategi preventif dan kuratif atas munculnya gejala penyakit sosial di dalam masyarakat.

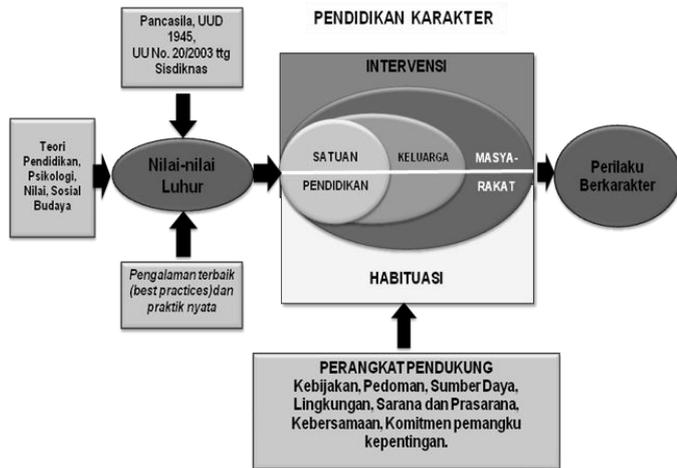
Karena efektivitas pendidikan karakter merupakan kontribusi dari integrasi tanggung jawab kampus, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka pendidikan karakter tidak bisa hanya mengandalkan bentuk pengajaran nilai-nilai apalagi hanya pada satu mata kuliah tertentu. Pengajaran nilai-nilai hanyalah salah satu bentuk atau strategi pendidikan karakter. Jauh akan lebih efektif jika pendidikan karakter dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergis baik melalui pendekatan pembelajaran di kelas, penciptaan kultur kampus, pendekatan berbasis komunitas, dan dukungan kebijakan-kebijakan pendidikan yang relevan. Di sini pembelajaran di kelas secara terintegrasi oleh seluruh guru berfungsi untuk mengembangkan proses pemberdayaan (*empowering*) dan humanisasi (*humanizing*) bagi pengembangan karakter peserta didik yang diinginkan. Penciptaan kultur kampus atau perguruan tinggi selanjutnya memberikan landasan humanisasi (*humanizing*) dan pembudayaan (*civilizing*) kepada peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik membiasakan pola-pola perilaku yang berlandaskan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Pendekatan berbasis masyarakat dimaksudkan untuk membiasakan, memantapkan, dan menguatkan nilai-nilai dan kompetensi yang telah dimiliki serta memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas hidup di masyarakat. Di sini perlu ada hubungan yang harmonis antara kampus, orang tua dan masyarakat dalam tanggung jawab pelaksanaan pendidikan karakter. Akhirnya, dukungan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan karakter itu sendiri akan membantu peserta didik memahami makna hubungan antara nilai-nilai pendidikan karakter yang dibina dan dimantapkan di kampus dan di masyarakat dengan operasionalisasinya secara sinkron dalam perbaikan mutu pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.

III. Strategi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Urgensi dari pelaksanaan komitmen nasional pendidikan karakter, telah dinyatakan pada Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya akhir khir Sarasehan Tanggal 14 Januari 2010, sebagai berikut.

- a) “Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yg tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh.
- b) Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh.
- c) Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, kampus dan orangtua. Oleh karena itu pelaksanaan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut.
- d) Dalam upaya merevitalisasi pendidikan dan budaya karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar/domain, yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Bagan Strategi Makro Pengembangan

Berdasarkan bagan di atas, *desain* pengembangan pendidikan Karakter secara makro dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penanaman nilai karakter

Nilai karakter yang akan ditanamkan kepada peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UU Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari pengalaman praktik yang baik dan dikembangkan berlandaskan teori pendidikan, psikologi, nilai sosial dan budaya.

2. Pembentukan karakter

Pendidikan karakter dilaksanakan dalam rangka pembentukan perilaku berkarakter luhur melalui:

- a. Pembiasaan keseharian yang dilakukan di lingkungan kampus dan masyarakat,
- b. Intervensi yang dilakukan oleh kampus, keluarga dan masyarakat.

3. Dukungan Perangkat Kebijakan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan karakter diperlukan dukungan perangkat dalam bentuk kebijakan; pedoman, panduan, sumber daya, lingkungan yang kondusif, sarana dan

prasarana, semangat kebersamaan dan komitmen pemangku kepentingan.

4. Pengembangan Karakter

Semua upaya yang dilakukan melalui pembiasaan dan intervensi yang dilakukan kampus, keluarga, dan masyarakat diarahkan untuk membangun perilaku peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

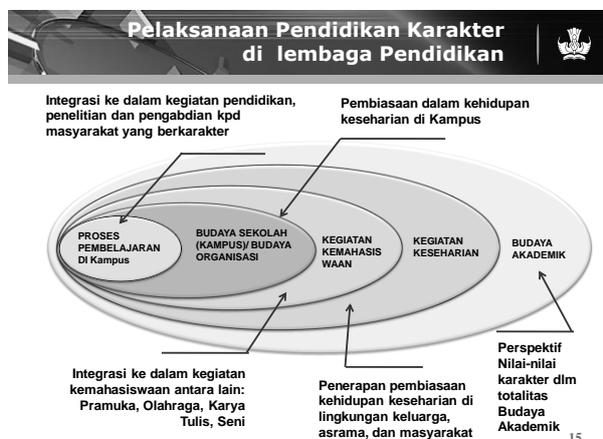
Adapun ruang lingkup pengembangan pendidikan karakter meliputi 3 kelompok, yaitu:

1. Pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk dan hamba Tuhan YME, yang akan menumbuhkan nilai keagamaan yang kuat pada gilirannya tumbuh sifat kasih sayang, jujur, toleran, sifat malu, saling menghargai dan menghormati, dan menjauhkan diri dari perilaku destruktif dan anarkis.
2. Pendidikan Karakter yang terkait dengan keilmuan, yang merangsang tumbuhnya “kepenasaranan intelektual” (*intellectual curiosity*). Pengembangan ini sangat penting untuk membangun pola pikir, tradisi, budaya keilmuan, dan daya inovasi serta kreativitas peserta didik.
3. Pendidikan Karakter yang menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai Bangsa Indonesia. Kecintaan karena sadar bahwa bangsa dan negara yang dilandasi oleh empat pilar yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

IV. Desain Pendidikan Karakter Secara Mikro di Tingkat Kampus

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan sarana utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus

proses pendidikan karakter di kampus. Pendidikan akan senantiasa menjadi ujung tombak dalam upaya pengembangan karakter manusia Indonesia yang bermartabat. Program pendidikan karakter pada konteks mikro dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 : Bagan Strategi Mikro Pengembangan Pendidikan Karakter

Berdasarkan pada gambar di atas, maka pendidikan karakter dapat diimplementasikan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yakni dengan mengintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui berbagai mata kuliah baik secara parsial maupun terpadu dalam kelompok tertentu.
2. Pelaksanaan kegiatan pembiasaan keseharian yang berada di kampus, melalui pengembangan budaya/kultur kampus untuk pengembangan pendidikan karakter.
3. Pelaksanaan ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pendidikan kepramukaan, olah raga, seni, keagamaan, dan lain-lain.
4. Kegiatan pembiasaan keseharian di kampus dan rumah dilakukan dengan memberdayakan dukungan orangtua dan masyarakat.

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata kuliah. Khusus untuk materi Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap. Oleh karena itu pengembangan karakter harus menjadi **misi** utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan karakter. Untuk kedua mata kuliah tersebut, karakter dikembangkan sebagai dampak langsung dan dampak pengiring melalui pengalaman belajar tertentu. Sementara itu mata kuliah lainnya, yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib mengembangkan rancangan pembelajaran semesteran pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam substansi/kegiatan mata kuliah sehingga memiliki dampak langsung dan pengiring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta didik. Lingkungan kampus perlu ditata situasinya agar lingkungan fisik dan sosial kultural kampus memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga kampus lainnya terbiasa melakukan kegiatan keseharian di kampus yang mencerminkan perwujudan karakter yang ingin dicapai. Pola ini ditempuh dengan melakukan pembiasaan dengan pembudayaan aspek-aspek karakter dalam kehidupan keseharian di kampus dengan pendidik sebagai teladan.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kampus yang bersifat umum dan terkait pada berbagai mata kuliah. Kegiatan ekstra-kurikuler meliputi kegiatan kepramukaan, dokter kecil, Palang Merah Remaja (PMR), pecinta alam, klub olahraga, dan seni budaya perlu dikembangkan secara terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni dan keterampilan dilakukan dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, kompetisi atau

festival. Berbagai kegiatan olahraga dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk penanaman dan pengembangan sikap, perilaku, dan kepribadian para sesuai agar menjadi manusia Indonesia berkarakter baik seperti: jiwa sportif, kerjasama, kebanggaan, disiplin, menghargai orang/kelompok lain, berjiwa besar dan tanggungjawab.

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap karakter mulia yang dikembangkan di kampus. Proses penguatan tersebut dilakukan secara kontinyu sehingga menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini dapat dilakukan lewat himpunan alumni, pertemuan peserta didik, kunjungan/kegiatan peserta didik yang berhubungan dengan kumpulan kegiatan kampus dan keluarga yang bertujuan untuk menyamakan langkah dalam membangun karakter luhur di kampus, di rumah dan masyarakat.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-stimulus kepada anak didik, agar terjadinya respons yang positif pada diri anak didik. Kesediaan dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan mampu menimbulkan respons yang baik terhadap stimulus yang mereka terima dalam proses pembelajaran. Respons akan menjadi kuat jika stimulusnya juga kuat. Ulangan-ulangan terhadap stimulus dapat memperlancar hubungan antara stimulus dan respons, sehingga respons yang ditimbulkan akan menjadi kuat. Hal ini akan memberi kesan yang kuat pula pada diri anak didik, sehingga mereka akan mampu mempertahankan respons tersebut dalam memorinya. Hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lebih baik kalau dapat menghasilkan hal-hal yang menyenangkan. Efek menyenangkan yang ditimbulkan stimulus akan mampu memberi kesan yang mendalam pada diri anak didik, sehingga mereka cenderung akan mengulang aktivitas tersebut. Akibat dari hal ini adalah anak didik mampu mempertahankan stimulus dalam memory mereka dalam waktu yang lama

(*longterm memory*), sehingga mereka mampu merecall apa yang mereka peroleh dalam pembelajaran tanpa mengalami hambatan apapun. *Active learning* (belajar aktif) pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dengan memberikan *strategi active learning* (belajar aktif) pada anak didik dapat membantu ingatan mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Hal ini kurang diperhatikan pada pembelajaran konvensional yang berlangsung selama ini. Dalam metode *active learning*, setiap materi pelajaran baru yang diberikan dosen, harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar mahasiswa dapat belajar secara aktif guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.

V. Penutup

Pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan di perguruan tinggi. Ini tidak saja penting sebagai langkah kuratif terhadap gejala demoralisasi dan patologi sosial di masyarakat, tetapi juga sebagai langkah preventif dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya atau pembentukan warga negara Indonesia yang baik yang mencerminkan karakter kehidupan berbangsa. Untuk kepentingan ini Pendidikan Karakter di perguruan tinggi perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya. Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan

kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan. Di samping itu, beberapa ideologi pendidikan lain yang telah diterapkan terutama di negara maju seperti ideologi perenialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan paedagogi kritis dapat digunakan secara selektif dalam melandasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia.

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan strategi berbentuk: (1) pengukuhan nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) pengukuhan pelaksanaan pembangunan karakter bangsa. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan: (a) memantapkan hasil-hasil penyadaran mengenai pembangunan karakter bangsa serta implementasinya sehingga menjadi perilaku nyata secara perorangan maupun kolektif, (b) meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai baik karakter bangsa agar menjadi semakin kukuh jika didesain melalui perilaku konkret secara personal dan antarpersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (c) meningkatkan strategi dan implementasi pembangunan karakter dengan dimantapkan melalui kegiatan nyata yang dilakukan oleh keluarga, komunitas, atau masyarakat dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan budaya lokal, nasional, dan budaya global yang diadaptasi melalui proses akulturasi.

Dengan demikian, diharapkan terbentuknya masyarakat yang menjunjung etika dan berkemampuan tinggi dalam memanifestasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, H. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain Induk*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukadi. 2006. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Bandung: UPI Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
- Van Scotter, R. D. et al. (1985). *Social Foundations of Education*. Second Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Widja, I G. 2009. Pendidikan sebagai Ideologi Budaya: Suatu Pengantar ke Arah Pendidikan Kritis. Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Williams, R.T. dan Megawangi, R. 2010. Kecerdasan Plus Karakter. www.teknologiotak.com. Diunduh Mei 2010.

Winataputra, U.S. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

*) ***CURRICULUM VITAE***



Ida Bagus Rai lahir di Bitera, Gianyar pada tahun 1959. Lulus Program S1 Jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Udayana pada tahun 1984. Lalu melanjutkan Program S2 Jurusan Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia. Penulis adalah dosen senior Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah FKIP Universitas Dwijendra. Saat ini Penulis menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Dwijendra.